

PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL: Studi Kasus Data Panel di Indonesia

Jamzani Sodik
UPN “Veteran” Yogyakarta

Abstract

The aim of this study is to examine the affect of government expenditure on regional economic growth by using the data of 26 provinces for periods of 1993-2003, and by applying GLS method (General Least Square) with panel data. Factors that affect the regional economic growth are private investment (Ip), government investment (Ig), government consumption (Cg), and labor force (L), we also identify other factors that can influence the regional economic growth. This variable is the rate openness economic provinces (X-M).

The results found the regional economic growth for periods 1993-2003 is influenced by government investments (Ig), government consumption (Cg), labor force (L) and rate openness economic province (X-M). However, private investments (Ip) do not affect to regional economic growth.

Keywords *private investments, government investments, government consumption, regional economic growth, and panel data*

PENDAHULUAN

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, menjadi subyek penting untuk dianalisis dan diperdebatkan. Kontroversi utama adalah dapatkan sektor publik dapat menaikkan dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi (*long run steady state growth economy*). Secara umum gambaran pengeluaran publik, yaitu infrastruktur fisik atau *human capital*, dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi keuangan khususnya pengeluaran dapat memperlambat pertumbuhan (*because of disincentif effect*). Secara umum dampaknya tergantung dari *trade-off* antara pengeluaran publik yang produktif dan *effects* pajak yang bersifat distorsif (*disrtortionary*).

Aktivitas pemerintah baik langsung maupun tidak langsung akan menaikkan total output sehingga mengalami interaksi dengan *private sector*. Lin (1994) secara garis besar mengatakan ada sesuatu yang penting sejalan dengan peran dimana pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan. Di sini sudah termasuk ketentuan mengenai barang publik dan infrastruktur, jasa sosial dan target intervensi (karena subsidi ekspor). Di sisi lain pajak pemerintah mungkin menyebabkan *misallocation of resources*, penyediaan barang publik yang tidak efisien, sehingga sektor publik menggunakan kelebihan dari pengeluaran pemerintah yang tidak produktif. Hal ini menyebabkan distorsi karena *disincentive effect*.

Teori pertumbuhan endogen memberikan gambaran mengenai peran pemerintah di dalam proses pertumbuhan.

Implikasinya bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang adalah *endogenous*. Ada beberapa faktor yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan jangka panjang, walaupun semuanya *endogenous growth models*, pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan salah satunya baik langsung ataupun tidak langsung (Brons, de Groot dan Nijkamp, 1999). Hasilnya dalam jangka panjang pertumbuhan dapat berbeda antar negara, dan tidak mengharuskan akan terjadi *convergence* dalam pendapatan perkapita. Secara signifikan, studi yang sama dari Dar dan AmirKhalkhali (2002) mencatat bahwa implikasi utama model *endogenous growth* adalah kebijakan pemerintah dapat melebar-kan jarak, sehingga dalam jangka panjang negara dapat menunjukkan kinerjanya. Artinya, ada tiga instrumen fiskal yaitu, pajak, pengeluaran (*expenditure*), dan keseimbangan anggaran secara agregat. Dampaknya dalam jangka panjang akan mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya, tingkat faktor akumulasi, dan kemajuan teknologi.

Fakta menunjukkan bahwa *pertama*, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten, bisa positif atau negatif. Hasil dan bukti berbeda di negara maupun di daerah. Folster dan Henrekson (1999) berargumen bahwa hubungannya negatif, sementara Agell et al (1999) menemukan hubungan yang tidak signifikan. *Kedua*, sifat dari dampak pengeluaran publik akan tergantung kondisinya. Mengikuti Barro (1990), kontribusi pengeluaran yang produktif positif terhadap pertumbuhan, dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif. Akhirnya tidak ada pernyataan mengenai arah hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi (Folster dan Henrekson, 1999).

Argumentasi yang lain juga datang dari adanya kenyataan bahwa hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah

dengan pertumbuhan datang dari data panel di negara yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda pula (Ghali, 1998). Sedangkan penelitian yang menggunakan data panel daerah propinsi di satu negara belum ada.

Dengan adanya kenyataan seperti di atas maka penelitian ini akan menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi regional (26 propinsi) di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Model Pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan GNP itu sebenarnya merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya ekuilibrium jangka panjang. Motivasi pokok tumbuhnya teori ini adalah untuk menjelaskan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar negara.

Model pertumbuhan endogen mencoba menjelaskan terjadinya divergensi pola pertumbuhan ekonomi antar negara dalam jangka panjang, meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa faktor teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Todaro, 2000)

Barro (1990) menguji model pertumbuhan endogen mengenai hubungan antara bagian pengeluaran pemerintah di dalam GDP dan tingkat pertumbuhan riil perkapita GDP. Keistimewaan model Barro ini adalah adanya *constant returns to capital* secara luas termasuk *private capital* dan *public services*. Secara luas mempertimbangkan input *public services* di dalam produksi, tepatnya hubungan yang timbul antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagain besar studi mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berasumsi bahwa implikasi semua pengeluaran investasi pemerintah adalah produktif (Barro, 1990).

Landau (1983, 1986) studi dengan data cross-section lebih dari 100 negara menemukan hubungan yang negatif antara tingkat pertumbuhan GDP riil perkapita dengan pengeluaran pemerintah. Termasuk di dalamnya pemerintah yang besar akan mengurangi pertumbuhan pendapatan per kapita (walaupun hasil ini belum tentu untuk negara miskin). Studi dari Kormendi dan Meguire (1985) menemukan bahwa tidak signifikan hubungan antara tingkat pertumbuhan riil GDP perkapita dan pengeluaran pemerintah. Di sisi yang lain Ram (1986), dan Grossman (1988) menemukan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat pengeluaran per sektor (*regardless of the disaggregation of expenditures*)

Diamond (1989) mengamati pengeluaran sosial, hasilnya menunjukkan signifikan positif berdampak terhadap pertumbuhan jangka pendek saat pengeluaran infrastruktur lebih sedikit berpengaruh (walaupun positif). Dia menemukan juga pengeluaran kapital negatif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sifat negatif di sini berhubungan pada periode jangka panjang dan tidak efisien berhubungan dengan pembiayaan publik. Barro (1991) menguji 98 negara, hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antar tingkat pertumbuhan output dan pengeluaran konsumsi pemerintah, Sedangkan untuk *public investment* positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan output.

Devarajan dan Vinaya (1993) menemukan negatif dan tidak signifikan hubungan antara pengeluaran produktif dan pertumbuhan ekonomi. Lin (1994) menemukan pengeluaran tidak produktif negatif dan tidak signifikan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara industri tetapi signifikan positif berdampak pada pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Ada beberapa kasus di negara miskin, dimana tingkat pengeluarannya rendah,

dampaknya terhadap pertumbuhan mungkin lebih bermanfaat. Pada tingkat yang rendah pengeluaran pemerintah (*on productive goods*) dan perpajakan, dampak produktif barang publik mungkin melebihi ongkos sosial kenaikan pembiayaan (Folster dan Henrekson, 1999). Bagaimanapun ada tendensi untuk koreksi pajak lebih tidak efisien dan tidak produktif intervensi pemerintah yang lebih umum di negara miskin (Slemrod, 1995). Mempertimbangkan secara tidak langsung kebutuhan untuk perhatian di dalam kombinasi negara kaya dan miskin di dalam *study cross section*. Peristiwa ini adalah keadaan satu negara dengan *study time series*, karena itu disini jelas bahwa hubungan antara pengeluaran dan pertumbuhan sangat kompleks. Ghali (1997) melakukan studi di Saudi Arabia. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti yang konsisten bahwa perubahan di dalam pengeluaran pemerintah berdampak terhadap pertumbuhan output riil perkapita. Yang terpenting disini adalah implikasi dari perilaku kebijakan publik di Saudi Arabia bahwa pemerintah memperlakukan defisit anggaran yang menunjukkan ukuran dan batasan peran pemerintah di dalam perekonomian.

Studi di Indonesia (Kompas, 2000) mengindikasikan bahwa penurunan pengeluaran pemerintah khususnya bagian dari sektor publik (*service*) tidak secara jelas akan meningkatkan tingkat pertumbuhan.

Studi yang senada dari (Ramayadi, 2003) menemukan bahwa ukuran pemerintah cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengeluaran pemerintah yang tidak produktif (C_g/Y) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Hasil ini senada dengan temuan Barro (1990) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah yang tidak produktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil lain yang mengejutkan adalah bagian pengeluaran pemerin-

tah (I_g/Y) menunjukkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penemuan ini mengungkapkan adanya ketidakjelasan yang disertakan dalam program pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara umum hasil ini menunjukkan bahwa adanya ketidak-efisienan dalam manajemen secara keseluruhan dari anggaran pemerintah di Indonesia selama periode itu.

METODOLOGI PENELITIAN

Penurunan Model Estimasi

Mengikuti model dari Barro (1990) tentang model pertumbuhan, Hsieh dan Lai (1994) memberikan model teori dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan. Mereka melihat adanya kenaikan pengeluaran pemerintah akan menurunkan pertumbuhan melalui *crowding-out private investment*. Di sisi yang lain bagian pembelanjaan per kapita pemerintah yang tinggi di dalam GDP akan membuat *private capital* lebih produktif, sehingga kenaikan *marginal product of capital* menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Model dasar yang digunakan adalah modifikasi yang dipakai oleh Kweka dan Morissey (1999), yang mengadopsi *growth accounting* model dari Lin (1994) dimana output (Y) asumsinya adalah fungsi produksi input, *capital* (K) dan *labor* (L). Disini ada dua sektor, pemerintah (g) dan *private* (p) dan keduanya mengelompok tiap faktor produksi. Di dalam model ini output adalah fungsi dari dua faktor produksi dan pengeluaran pemerintah (G). Asumsinya bahwa *government services* berdampak terhadap efisiensi produktif dari unit *capital* dan *labor*, tetapi pengaruhnya bisa positif ataupun negatif. Di dalam konteks negara berkembang, keterbukaan ekonomi ($X - M$) sangat potensial sebagai penentu pertumbuhan, sehingga variabel ini akan dimasukkan dalam model. Lebih lanjut kita dapat mewakilkan ΔK sebagai investasi (I). Pengeluaran pemerintah dapat dibagi ke

dalam komponen pengeluaran produktif (I_g) dan tidak produktif (C_g), dimana I_p adalah *private investment* ($I=I_G + I_p$):

$$Y = aI_p^1 L^1 I_g^3 C_g^4 (X - M)^5 \dots\dots\dots (1)$$

dimana $1, 2, \dots, 5$ adalah elastisitas dan subscripts p dan g mewakili *private* dan pemerintah. L diasumsikan input tenaga kerja yang dapat diwakili (proxy) dengan jumlah angkatan kerja. Sehingga disini jelas bahwa variabel dalam bentuk logaritma natural dapat ditulis sebagai berikut:

$$\ln y_{it} = \ln a + 1 \ln I_{p_{it}} + 2 \ln I_{g_{it}} + 3 \ln C_{g_{it}} + 4 \ln (X - M)_{it} + 5 \ln LF_{it} + \epsilon_{it} \dots (2)$$

Dimana:

- t = waktu (1993-2003)
- i = daerah propinsi (26 Propinsi)
- $\ln y$ = output atau laju pertumbuhan PDRB perkapita daerah/propinsi
- $\ln I_p$ = *private investment* daerah atau propinsi
- $\ln I_g$ = investasi pemerintah (pengeluaran pembangunan) daerah/propinsi
- $\ln C_g$ = konsumsi pemerintah (pengeluaran rutin) daerah/propinsi
- $\ln(X - M)$ = tingkat keterbukaan ekonomi daerah/propinsi
- $\ln LF$ = *labor force* daerah/propinsi
- ϵ = error term

Persamaan diatas, 1 adalah elastisitas *private investment* bersifat ambiguous, sehingga $1 \neq 0$, begitu juga untuk $2 \neq 0$, $3 \neq 0$, Sedangkan variabel tingkat keterbukaan ekonomi 4 dan angkatan kerja 5 diharapkan positif.

Metode analisis yang dilakukan menggunakan data runtut waktu (*times series*) dari tahun 1993-2003 dan data *Cross*

section dari Propinsi-propinsi di Indonesia (26 propinsi).

Tehnik Analisis Data

Secara teoritis, terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data yang digabungkan tersebut. Pertama, semakin banyak jumlah observasi yang dimiliki bagi kepentingan estimasi parameter populasi yang berakibat positif dengan semakin besarnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan menurunkan kemungkinan kolinearitas antar variabel bebas. Kedua, dimungkinkannya estimasi masing-masing karakteristik individu maupun karakteristik menurut waktu secara terpisah. Dengan demikian, analisa hasil estimasi akan lebih komprehensif dan mencakup hal-hal yang lebih mendekati realita. (lihat, Hsio, 1995).

Dalam regresi panel, perbedaan model, seperti *one-way* atau *two-way* model koreksi kesalahan (ECM), dapat dibentuk dengan memperhatikan struktur *error-term*. Dalam *one-way* model regresi *error* komponen hanya terdapat satu *effect*, yakni *individual effect* atau *time effect*. Tetapi dalam regresi *two-way* error komponen model akan terdapat kedua efek tersebut baik *individual effect* maupun *time effect*. Dalam *one-way* error komponen model, μ_i dinotasikan sebagai *unobservable* individual spesifik efek, sedangkan u_{it} merupakan *disturbance* ($u_{it} = \mu_i + u_{it}$). Di sisi lain, dalam regresi *two-way* error komponen model, μ_i dinotasikan sebagai *unobservable* individual spesifik efek, μ_t dinotasikan sebagai *unobservable time effect* dan u_{it} merupakan *stokastik disturbance term*. Lebih lanjut guna menentukan model manakah yang paling sesuai, maka keberadaan individual dan/atau *time effect* harus diuji. Pada pengujian ini, *null hypothesis* yang diuji sebagai berikut:

$$H_{o1}: \sigma^2 = \sigma^2 = 0$$

(no time and individual effects)(3)

$$H_{o2}: \sigma^2 = 0$$

(no individual effects)(4)

Pengujian kedua *null hypothesis* di atas dapat dilakukan dengan F-test ataupun *Hausman-test*. Pada penelitian ini pengujian hipotesis untuk menentukan apakah terdapat komponen *time* dan *individual effect* atau *individual effect* saja akan dilakukan melalui Hausman-test.

Spesifikasi Hausman Test

Asumsi utama dalam model regresi adalah bahwa *error* komponen atau $E(u_{it} / X_{it}) = 0$. Hal ini penting karena faktor pengganggu (*disturbance*) mengandung efek *individual invariant* (μ_i) yang bersifat *unobserved* dan mungkin saja berkorelasi dengan X_{it} . Sebagai contoh, dalam persamaan bahwa μ_i mungkin dinotasikan sebagai *unobservable* secara individual dan mungkin saja berkorelasi dengan sejumlah variabel pada sisi kanan persamaan. Dalam kasus ini, $E(u_{it} / X_{it}) \neq 0$ dan estimator $\hat{\beta}_{GLS}$ akan *bias* dan tidak konsisten dengan β . Namun demikian, dengan melakukan transformasi μ_i dan mengabaikannya maka *within estimator* ($\hat{\beta}_{Within}$) akan *unbiased* dan konsisten dengan β . Hausman (1978) menyarankan untuk membandingkan $\hat{\beta}_{GLS}$ dengan $\hat{\beta}_{Within}$, di mana keduanya konsisten dengan *null hypothesis* $H_o : E(u_{it} / X_{it}) = 0$, tetapi tentunya dengan perbedaan limit probabilitas. Pada kenyataannya, $\hat{\beta}_{Within}$ akan konsisten bahkan ketika H_o benar atau tidak benar,

sedangkan $\hat{\beta}_{GLS}$ akan BLUE, konsisten dan *asymptotic* pada H_o , tetapi akan tidak konsisten ketika H_o tidak benar. Uji statistik akan mendasarkan pada $q_1 = \hat{\beta}_{GLS} - \hat{\beta}_{Within}$, dengan $H_o, \quad p \lim q_1 = 0$ dan $cov(q_1, \hat{\beta}_{GLS}) = 0$.

Dengan menggunakan kenyataan bahwa $\hat{\beta}_{GLS} = (X'\Omega^{-1}X)^{-1}X'\Omega^{-1}u$ dan $\hat{\beta}_{Within} = (X'QX)^{-1}X'Qu$, akan diperoleh $E(q_1) = 0$, dan $cov(\hat{\beta}_{GLS}, q_1) = var(\hat{\beta}_{GLS}) - cov(\hat{\beta}_{GLS}, \hat{\beta}_{Within}) = (X'\Omega^{-1}X)^{-1} - (X'\Omega^{-1}X)^{-1}X\Omega^{-1}E(uu')QX(X'QX)^{-1} = (X'\Omega^{-1}X)^{-1} - (X'\Omega^{-1}X)^{-1} = 0 \dots\dots\dots (5)$

Selanjutnya jika $\hat{\beta}_{Within} = \hat{\beta}_{GLS} - q_1$, akan diperoleh:

$$var(\hat{\beta}_{Within}) = var(\hat{\beta}_{GLS}) + var(q_1)$$

Sejak $cov(\hat{\beta}_{GLS}, q_1) = 0$, maka;

$$var(q_1) = var(\hat{\beta}_{Within}) - var(\hat{\beta}_{GLS}) = \frac{2}{v}(X'QX)^{-1} - (X'\Omega^{-1}X)^{-1} \dots\dots\dots (6)$$

Dengan demikian Hausman test statistik adalah sebagai berikut:

$$m_1 = q_1' \left[var(q_1) \right]^{-1} q_1 \dots\dots\dots (7)$$

dimana H_o *asymptotic* berdistribusi sebagai χ^2_K di mana K adalah dimensi *vector slope*. Selanjutnya guna memenuhi aspek teknis operasional, Ω akan digantikan oleh

konsistensi estimator $\hat{\Omega}$, sehingga GLS akan memungkinkan untuk dilakukan. Penolakan terhadap statistik Hausman tersebut berarti penolakan terhadap *fixed effect model* atau *dummy variable model*. Sehingga semakin besar nilai statistik Hausman tersebut, semakin mengarah kepada penerimaan dugaan *error components model*. (lihat, Baltagi, 2003).

PEMBAHASAN HASIL

Hasil Uji Hausman Test

Berdasarkan tabel 1. hasil uji Hausmann test diatas menunjukkan bahwa untuk periode pengamatan 1993-2003 *chi square* hitung lebih besar daripada *chi square table* sehingga H_o ditolak. Dengan demikian estimasi menunjukkan bahwa pendekatan *fixed effects* lebih baik dibandingkan dengan pendekatan *random effect*. Berarti terdapat perbedaan antar unit yang dapat dilihat melalui perbedaan dalam *constans term*. Dalam *fixed effects model* diasumsikan bahwa tidak terdapat *time-specific effect* dan hanya memfokuskan pada *individual-specific-effects*.

T
Tabel 1: Uji Hausman test

Periode Pengamatan	χ Hitung	χ Tabel
1993-2003	904,7186*	11,0705

Sumber : data diolah
Keterangan : signifikan pada α 5%

Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Menurut hasil estimasi yang dilakukan pada periode pengamatan 1993-2003 variabel investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sedangkan variabel investasi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sedangkan variabel angkatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan tanda yang negatif. Untuk variabel yang lain yaitu variabel ekspor

netto (tingkat keterbukaan ekonomi) menunjukkan angka yang negatif dan signifikan.

Tabel 2: Hasil Estimasi Regresi dengan Metode Fixed Effect

Variabel	Periode 1993-2003
Ip (<i>Investment Private</i>)	-0.056982 (0.067780)
Ig (<i>Investment Government</i>)	1.050820*** (0.191504)
Cg (<i>Consumption Government</i>)	3.607972*** (0.174898)
(X-M)	-0.184010** (0.090081)
L (<i>Labor Forces</i>)	-5.417489*** (1.127152)
F hitung	559.6535
R hitung	0.897739

Sumber : data diolah

Keterangan : - *** sig pada $\alpha = 0,01$; ** sig pada $\alpha = 0,05$; * sig pada $\alpha = 0,10$

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang negatif. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah daerah yang terdiri dari pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin berpengaruh dan signifikan dengan tanda positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Untuk variabel yang lain yaitu ekspor netto dan angkatan kerja signifikan dengan tanda yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Tingkat keterbukaan suatu daerah yang ditunjukkan dengan variabel ekspor netto signifikan dengan tanda negatif, ini menunjukkan bahwa variabel ini belum memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sedangkan variabel angkatan kerja signifikan dengan tanda negatif dan nilai koefisien yang paling tinggi, menunjukkan bahwa angkatan kerja belum terserap di daerah (banyak pengangguran) sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi turun.

Hasil studi ini sesuai dengan studi sebelumnya bahwa pengeluaran pemerintah (pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, terutama pengeluaran rutin yang mempunyai koefisien yang tinggi.

Sedangkan investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hasil studi ini sesuai dengan studi sebelumnya bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah memperburuk iklim investasi di Indonesia. Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah (Perda) yang tidak “pro-bisnis” diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan *public* yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perijinan dan birokrasi. Ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan baik resmi maupun liar. Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemda maupun pemerintah pusat) perijinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (World Bank, 2004).

Studi Kuncoro, et.al (2004) menunjukkan masih adanya “*grease money*” dalam bentuk pungli, upeti dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sejak mencari bahan baku, memproses input menjadi output, maupun ekspor. Studi dari LPEM (2000) terhadap lebih dari 60 kabupaten/kota, telah menemukan bahwa ketidakpastian usaha telah meningkat secara signifikan selama periode transisi otonomi daerah.

Variabel ekspor netto memiliki arah yang konsisten dengan teori (baik sebelum maupun setelah otonomi daerah) tetapi tidak signifikan. Sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat keterbukaan perekonomian suatu daerah belum berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional.

PENUTUP

Kesimpulan

Selama periode penelitian ditemukan bahwa variabel investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sedangkan pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri.

Variabel keterbukaan ekonomi (*ekspor netto*) memiliki hubungan yang konsisten dengan teori (baik sebelum maupun setelah otonomi daerah) tetapi tidak signifikan. Sekaligus menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan perekonomian suatu daerah belum berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional.

Variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan tanda negatif untuk tahun 1993-2003 dan tahun 1998-2000 (sebelum era otonomi) ini menunjukkan bahwa daerah belum bisa menyerap angkatan kerja yang ada di daerah tersebut sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sedangkan untuk periode 2001-

2003 (setelah otonomi daerah) variabel ini tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Saran

Untuk lebih meningkatkan investasi swasta dan ekspor di daerah-daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota perlu ada koordinasi peraturan perundang-undangan baik tingkat vertikal (antara pemerintah pusat-propinsi-kabupaten/kota) dan pada tingkat horisontal (antar departemen dan badan-badan lainnya yang terkait), sehingga diperlukan reformasi mendasar berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis, ekspor dan investasi di Indonesia. Agenda reformasi yang perlu dilakukan adalah: pertama, mengkaji semua Perda dari Pemda Kabupaten/kota di Wilayahnya, kedua, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan propinsi lain dalam mengembangkan prosedur dan standar pengkajian Perda.

Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin) diusahakan seefisien mungkin disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, sehingga memberikan *multipiler effect* yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Statistik Indonesia, BPS, berbagai edisi.
- Agell, J., T. Lindh and H. Ohlsson (1999), "Growth and the Public Sector: a Reply", *European Journal of Political Economy*, 15:2, 359-336.
- Baltagi, B. H (2003), "*Econometric Analysis of Panel Data*", Second Edition, John Wiley & Sons, LTD, The Atrium, Southern Gate, Chichester West Sussex PO198SQ, England.
- Barro, Robert J (1990), "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth", *Journal of Political Economy* 98 (5), 103-125.
- Barro, Robert J. (1991), "Economic Growth in a Cross section of Countries", *Quarterly Journal of Economy* 106, 407-444.
- Brons, M., H.L.F. de Groot and P. Nijkamp (1999), "*Growth Effect of Fiscal Policies*," Timmergen Discussion Paper, Amsterdam, Vrije Universiteit.

- Cheng Hsiao (1986), *“Analysis of Panel Data”*, Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Damodar Gujarati (2003), *“Basic Econometrics”*, Third Edition, Mc Graw- Hill, inc. New York.
- Dar, Atul A. and Sal Amir Khalkhali (2002), “Government Size, factor accumulation, and Economic Growth: Evidence from OECD Countries”, *Journal of Policy Modeling* 24 (7-8), 679-692.
- Devarajan, S. and S. Vinaya (1993), “What do Government Buy? The composition of Public Spending and Economic Performance”, *Policy Research Working Paper*, The World Bank, WPS 1082.
- Diamond, J (1989), “Government Expenditure and Economic Growth: An Empirical Investigation”, *IMF Working Paper* No. 89/45, Washington DC.
- Folster, S. and M. Henrekson (1999), “Growth and Public Sector: a critique of the critics”, *European Journal of Political Economy*, 15:2, 337-358.
- Kweka, Josaphal. P. and Morrissey, O. (1999), “Government Spending And Economic Growth Empirical Evidence from Tanzania (1965-1996)”, Paper Prepared for the *DSA Annual Conference*, University of Bath, 12-14 September 1999.
- Landau, D. (1983), “Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Evidence,” *Southern Economic Journal*, Vol 49, 783-97.
- Lin, S.A.Y (1994), “Government Spending and Economic Growth”, *Applied Economic*, 26, 83-94.
- Ghali, K.H (1997), “Government Spending and Economic Growth in Saudi Arabia”, *Journal of Economic Development*, Vol 22, No.2 Desember 1997.
- _____ (1998), “Government Size and Economic Growth: Evidence from a Multivariate Cointegration Analysis”, *Applied Economic* 31, 975-987.
- Guseh, J. S (1997), “Government Size and Economic Growth in Developing Countries: A political-economy framework”, *Journal of Macroeconomic* 19, 175-192.
- Grossman, P.J 1988, “Government and Economic Growth. A non-linear Relationship “, *Public Choice*, Vol. 56, 193-200.
- Hsieh, E. and Lai, K.S (1994), “ Government Spending and Economic Growth: The G-7 Experience”, *Applied Economic* Vol. 26, 535-542.
- Kormendi,R. and P. Meguire (1985), “Macroeconomic Determinants of Growth: Cross Country evidence”, *Journal of Monetary Economic*, 16, 141-164.
- Kompas, T, (2000), “ Private Incentives, Government Size and Economic Growth in Indonesia,” *International Journal of Business*, Gadjah Mada University.
- Kuncoro, M., et al (2004), *“Domestic Regulatory Constranis to Labor-Intensive Manufacturing Ekspor”*, Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) bekerja

sama dengan Pusat Studi Asia dan Pasifik, Universitas Gadjah Mada (PSAP-UGM), dengan sponsor Growth through Investment, Agriculture and Trade (GIAT)-United States Agency for International Development (USAID).

- Ram (1986), "Government Size and Economic Growth: A new Framework and some Empirical evidence from cross-sectional and tome-series data", *American Economic Review*, Vol.7, No.1 191-203.
- Ramayadi, Arief (2003), "*Economic Growth and Government Size in Indonesia: Some Lesson for The Local Authorities*", " The 5th IRSA INTERNATIONAL CONFERENCE, Regional Development in The Era of Decentralization: Growth, Poverty, and Environment, Bandung.
- Slemrod, J. (1995), "*What do cross-country studies teach about government involvement, prosperity, and economic growth?*", *Brookings Papers on Economic Activity*, 2, 373-431.
- Todaro, M. P, (2000), "*Ekonomci Development*", 7^{ed}, Addison Wesley.
- World Bank (2004).